

**PENGUATAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PROVINSI
BERSAMA KOMUNITAS KEPEMUDAAN DI KOTA MATARAM DALAM
MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)**

Khairur Rizki^{*}, Muhammad Sood, Valencia Husni

*Program Studi Hubungan Internasional University of Mataram,
Mataram, Indonesia.*

Alamat korespondensi : krizki@unram.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirancang oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB). Agenda ini harus melibatkan semua pihak agar dapat tercapai. SDGs telah menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibanyak negara termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo merespon SDGs dengan mengeluarkan Perspres sebagai instruksi agar pemerintah daerah turut melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs. Salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah NTB membentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik NTB. Pengabdian ini dilaksanakan untuk menguatkan pelaksanaan aksi RAD terutama di level masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan SDGs serta menjelaskan pelaksanaan RAD kepada komunitas – komunitas kepemudaan di kota Mataram. Selain itu kegiatan ini juga melibatkan pemerintah provinsi NTB yang diwakili BAPPEDA provinsi. Metode kegiatan ini diselenggarakan dengan model diskusi publik di salah satu ruang publik di kota Mataram. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Keywords : Komunitas Kepemudaan; Kota Mataram; RAD; SDGs

PENDAHULUAN

Kehidupan yang lebih sejahtera merupakan sebuah cita-cita luar biasa yang ingin dicapai setiap negara di dunia. Tentunya menghadirkan kehidupan yang lebih baik tidak lepas yang dari namanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang mana dijelaskan oleh Elim Salim yaitu sebuah proses pembangunan (fisik dan non fisik) yang memaksimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia dengan menyelaraskan dan mengintegrasikan sumber daya tersebut dengan eksistensi makhluk hidup untuk pembangunan. Artinya pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan untuk memenuhi kepentingan banyak orang tanpa mengorbankan generasi berikutnya. SDGs dapat juga dikatakan sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup.

Salah satu aktor yang berperan penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan adalah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). PBB merupakan sebuah organisasi terbesar internasional yang beranggotakan 193 negara berdaulat. Dengan jumlah anggota tersebut PBB diharapkan dapat melaksanakan peran penting dalam menghasilkan kehidupan yang lebih baik dalam dimensi apapun. Salah satu program utama PBB untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan mega program yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Mega program ini diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 dan diproyeksikan sampai tahun 2030. SDGs menjadi semacam cetak biru atau “kiblat” untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Program tersebut harus dilaksanakan secara merata baik oleh dan di negara maju dan juga oleh dan di negara berkembang seperti Indonesia terutama di Kota Mataram, Provinsi NTB.

Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan (goals) utama. Dimana ke-17 tujuan diproyeksikan tercapai pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan SDGs adalah:

1. Tujuan Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk
2. Tujuan Tanpa Kelaparan, mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik
3. Tujuan Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk manusia
4. Pendidikan Berkualitas, yaitu menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar
5. Kesetaraan Gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal berkelanjutan dan modern
8. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh dan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Industri Inovasi dan Infastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang Tangguh dan meningkatkan industry yang inklusif, berkelanjutan dan berinovasi
10. Berkurangnya Kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra antar Negara
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, yaitu Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Komsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
13. Penanganan dan Perubahan Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya
14. Ekosistem Lautan, yaitu Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

15. Ekosistem Daratan, yaitu Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, yaitu menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yaitu Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dari apa yang disebut oleh PBB melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, menyadarkan kita bahwa untuk mencapai semua tujuan pembangunan tersebut harus melibatkan banyak aktor. Bukan saja negara (sebagai entitas yang paling memiliki otoritas dan kekuasaan) tapi juga aktor non negara agar pembangunan berkelanjutan yang berpedoman dengan SDGs bisa terlaksana hingga akar rumput termasuk di kota Mataram. Kota Mataram sendiri merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki sekitar 495.681 penduduk. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat administrasi tentunya kota Mataram menjadi barometer utama dalam pembangunan, baik yang formal maupun non formal di Nusa Tenggara Barat. Karena itu penulis kemudian mengadakan diskusi publik dengan mengikutsertakan beberapa komunitas pemuda yang bergerak dalam isu sosial di Kota Mataram dan BAPPEDA provinsi NTB. Komunitas pemuda ini yang nantinya menjadi target penguatan nilai SDGs yang dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) provinsi Nusa Tenggara Barat Penulis tidak membatasi keikutsertaan komunitas pemuda dalam kegiatan pengabdian ini, sehingga sangat memungkinkan jika pada kegiatan inti, pihak yang terlibat terdiri dari komunitas pemuda dan jaringannya. Pengabdian ini juga diharapkan dapat menjadi wadah serta peluang terciptanya kolaborasi antara pemerintah NTB dan komunitas pemuda di kota Mataram.

Urgensi pengabdian ini berangkat dari penelitian penulis yang membahas tentang Keamanan Manusia dalam pelaksanaan RAD di NTB. RAD tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perpres ini setiap gubernur di Indonesia harus menyusun RAD SDG bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Selain itu Gubernur juga wajib menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan sasaran SDG Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. RAD provinsi direncanakan pelaksanaannya selama 4 tahun (2019-2023). Payung hukum RAD NTB terdapat dalam Peraturan Gubernur Prov. NTB No. 36 Tahun 2018 tentang RAD Percepatan Pencapaian TPB/ SDGs Tahun 2019-2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Prioritas RAD NTB yaitu pada masalah kemiskinan dan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya masalah sanitasi.¹

METODE KEGIATAN

Penulis menyiapkan beberapa skenario terkait metode pelaksanaan. Hal ini dikarenakan kondisi penyebaran pandemik Covid-19. Jika pada hari pelaksanaan inti kota Mataram masih dalam kondisi protokol kesehatan maka kegiatan akan dilakukan secara daring dengan menggunakan platform zoom. Jika pada hari pelaksanaan kondisi kota Mataram sudah kondusif maka pelaksanaan akan dilakukan dengan tatap muka di salah satu ruang publik. Konsep pelaksanaan adalah Diskusi Publik dimana penulis akan memantik pertemuan dengan menjelaskan hasil penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi.

Sasaran dari Program Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah beberapa komunitas pemuda dan jaringannya di kota Mataram yang memiliki perhatian terhadap isu sosial dan pendidikan serta BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam implementasinya program Pengabdian pada Masyarakat ini berupa diskusi semi FGD dimana penulis akan memantik pertemuan dengan menjelaskan hasil penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan khususnya di Kota Mataram serta lebih memahami dampak-dampak yang akan timbul sebagai konsekuensi dari dinamika dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul kegiatan ini adalah Penguatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bersama Komunitas dalam Mencapai SDGs di Kota Mataram. Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi publik. Terdapat 8 komunitas yang hadir (termasuk diantaranya media alternatif yang diinisiasi pemuda). Kedelapan komunitas tersebut adalah Buku Ini Aku Pinjam, Jelajah Jangkok, Dewan Anak Mataram, Duta Damai NTB, Ide Berbagi Indonesia, Earth Hour Mataram, Dialogue, dan Lasingan.id. Selain dihadiri komunitas, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan BAPPEDA Provinsi NTB. BAPPEDA provinsi NTB diwakili oleh. Kegiatan diskusi publik ini diawali dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian. Materi tersebut merupakan hasil penelitian yang berjudul Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan dengan kerjasama tim pengabdian dimana Khairur Rizki dan Valencia Husni melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Sedangkan Dr Muhammad Sood menambahkan perspektif ilmu hukum dalam penelitian ini. Pada kegiatan

¹ Suara NTB, *Implementasikan SDG's, Kemiskinan dan Masalah Lingkungan Tantangan Terberat NTB*, <https://www.suarantb.com/implementasikan-sdgs-kemiskinan-dan-masalah-lingkungan-tantangan-terberat-ntb/>, 4 ferbuari 2021

sosialisasi ini materi disampaikan oleh Khairur Rizki dan Valencia Husni secara langsung, sedangkan Muhammad Sood berkoordinasi secara daring.

Setelah tim pengabdian menyampaikan pemaparan terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya tim dari BAPPEDA provinsi NTB juga menyampaikan pemaparan terkait pelaksanaan SDGs dari kacamata pemerintah. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dimana perwakilan dari masing – masing komunitas menyampaikan profil komunitas mereka dan kegiatan yang mereka laksanakan. Dari penyampaian tersebut dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut sangat mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan agenda SDGs. Kegiatan ini diakhiri dengan pernyataan perwakilan BAPPEDA provinsi NTB yang akan melibatkan komunitas – komunitas yang hadir untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan pada jumat 29 Oktober 2021 di kafe kedai SKM, pemilihan lokasi kegiatan dikarenakan kafe tersebut semi terbuka, luas, dan dapat diterapkan protokol kesehatan. Tim pengabdian juga menyiapkan *handsanitizer* di meja registrasi dan masker. Kegiatan dilaksanakan dari pukul 16.00 sampai pukul 18.00.

1. Materi Yang Disampaikan

Adapun materi yang disampaikan adalah beberapa highlight pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) provinsi NTB dalam mencapai tujuan SDGs. Hal ini untuk menyesuaikan aksi dari RAD yang berhubungan langsung dengan komunitas.

1.1 Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)²

a. Aksi Daerah untuk Tujuan 1

Pada Tujuan pertama, RAD provinsi NTB lebih berfokus pada penyajian data statistik angka kemiskinan. Selain itu pada RAD juga hanya menyajikan data terkait akses terhadap pendidikan yang dianggap sebagai salah satu faktor terbesar penyumbang angka kemiskinan. Belum dijelaskan aksi khusus yang akan dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memberikan akses pendidikan terhadap masyarakat di NTB. Upaya nyata yang dijelaskan dalam RAD adalah pengendalian harga pokok agar dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tetapi strategi ini belum secara langsung dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan.³ Persoalan kemiskinan menjadi bagian dari konsep Human Security terutama untuk dimensi ekonomi (*Economic Security*). Melihat strategi yang dijelaskan dalam RAD, pelaksanaannya masih belum sejalan dengan Human Security.

Selain itu upaya lain yang dijelaskan pada Tujuan 1 adalah pemberian jaminan kesehatan yang sayangnya tidak memiliki relevansi langsung terhadap isu kemiskinan. Meski demikian strategi pemberian jaminan kesehatan yang dilakukan Provinsi NTB cukup positif

² Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, R A D T P B Sdgs and Rencana Aksi Daerah, ‘RAD TPB/SDGs’, 2019.

³ Lalu Suryadi SP.MM, ‘Mengejar Angka Kemiskinan NTB 1 Digit’, 2019
<<https://bappeda.ntbprov.go.id/mengejar-angka-kemiskinan-ntb-1-digit/>>.

sehingga justru strategi ini selaras untuk memberikan rasa aman dalam dimensi kesehatan terhadap masyarakat (*Health Security*).

b. Aksi Daerah untuk Tujuan 2

Pada Tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, provinsi NTB memiliki strategi yang sangat baik. Beberapa aksi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Aksi yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Aksi berikutnya adalah jaminan kebutuhan gizi dan menginisiasi program Generasi Emas NTB (NTB).⁴ Aksi tersebut merupakan strategi yang sejauh ini berhasil meningkatkan angka pertumbuhan masyarakat terutama anak – anak. Aksi berikutnya yang dilakukan adalah akselerasi peningkatan produktivitas pertanian. Aksi cukup efektif mengingat NTB merupakan provinsi penghasil produk pertanian terbaik dan aksi ini juga sejalan dengan RPJMD. Selanjutnya untuk meningkatkan hasil pertanian pemerintah NTB juga melaksanakan pembangunan sistem pertanian tangguh agar dapat menjamin hasil pertanian berkualitas tinggi sehingga harga jualnya meningkat. Aksi terakhir untuk mewujudkan Tujuan kedua adalah pelestarian sumber daya ternak. Aksi ini dapat dikatakan berhasil karena hasil ternak NTB meningkat setiap tahunnya.

Aksi – aksi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan kedua ini ini dapat dikatakan berhasil sekaligus mencakup beberapa dimensi dalam Human Security seperti *Economic Security*, *Food Security*, dan *Health Security*. Pelaksanaan aksinya juga melibatkan masyarakat sehingga kolaborasi lintas kelompok juga merupakan prinsip yang sama dengan Human Security. Aksi – aksi ini sudah selayaknya untuk dilanjutkan dan ditingkatkan.

c. Aksi Daerah untuk Tujuan 3

Tujuan ketiga adalah menjamin kesehatan dan kesejahteraan semua usia. Pada tujuan ketiga ini pemerintah NTB memiliki beberapa Aksi. Yang pertama adalah mengurangi angka kematian ibu melalui pengawasan terhadap ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan K4 (kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama hamil) serta memastikan persalinan ditangani oleh tenaga medis profesional. Pemerintah provinsi NTB juga terus mendorong kehadiran lulusan bidan agar dapat terlibat dalam aksi pertama.

Aksi kedua adalah mengakhiri kematian bayi dan balita melalui peningkatan fasilitas kesehatan terutama di daerah yang masih belum memiliki fasilitas tersebut dan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan. Dua aksi tersebut sejauh ini masih menjadi upaya utama untuk mengurangi kematian bayi dan balita. Aksi berikutnya merupakan penyesuaian dengan kondisi daerah yaitu mengakhiri Epidemik penyakit menular. Salah satu epidemik tertinggi di

⁴ Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, ‘Generasi Emas NTB’
<<https://bappeda.ntbprov.go.id/category/gen/>>.

NTB adalah penularan HIV/AIDS.⁵ Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena NTB sebagai daerah destinasi wisata dan banyaknya warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Provinsi NTB memberikan fokus khusus untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS di NTB. Aksi yang dilakukan adalah dengan penambahan dan peningkatan konseling dan tes HIV secara sukarela (KTS). KTS sejauh ini memang masih dianggap salah cara terbaik untuk merespon HIV/AIDS. Selanjutnya pemerintah NTB juga melakukan pengendalian HIV/AIDS melalui pengamatan terhadap hasil penapisan darah. Selain HIV/AIDS, TBC atau Tuberkulosis juga disebut sebagai salah satu endemik di NTB namun pada RAD tidak dijelaskan aksi untuk merespon endemi tersebut.

Aksi selanjutnya yang dilakukan untuk tujuan ketiga adalah mengakhiri kematian akibat penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi, obesitas dan pemeriksaan kanker leher rahim dan payudara adalah bentuk PTM yang terjadi di NTB. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM di semua tingkatan pelayanan kesehatan, penanggulangan faktor resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat. Salah satu upaya paling nyata adalah melakukan pengukuran tekanan darah yang dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Aksi ini juga masih berhubungan dengan aksi selanjutnya yaitu mencapai cakupan kesehatan universal melalui peningkatan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dua aksi terakhir yang dilakukan pemerintah NTB untuk mencapai target Tujuan kedua adalah meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, obat, dan vaksin.

Jika dilihat dari pendekatan Human Security, aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam mencapai target Tujuan ketiga dapat dikatakan sangat baik dan memiliki ciri *people centered*. Keterlibatan masyarakat dalam beberapa aksi tersebut juga dapat dikatakan mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Beberapa dimensi Human Security yang dilaksanakan meliputi *Health Security*. Sebagai turunan dari Human Security, konsep *Health Security* memiliki tujuan melindungi manusia dari berbagai macam penyakit dan gaya hidup tidak sehat.

d. Aksi Daerah untuk Tujuan 4

Tujuan keempat dalam SDGs adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terpenting dalam pembangunan sekaligus dalam memberikan rasa aman secara struktural kepada manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah, pemerintah NTB mengambil sikap dengan perluasan akses pendidikan untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif.⁶ Aksi ini juga

⁵ Pemerintah Provinsi NTB, 'Edukasi Masyarakat Secara Masif, Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS Di NTB', 2021 <<https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/edukasi-masyarakat-secara-masif-berantas-penyebaran-virus-hivaid-ntb>>.

⁶ I Nyoman Wijana and Muhammad Suhardi, 'PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT', *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 1.1 (2018), 12–14.

sekaligus untuk menurunkan disparitas pendidikan berdasarkan gender. Dua aksi tersebut juga sekaligus untuk membantu keberhasilan RPJMD dan RPJMN. Tentunya aksi tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Jika dilihat dari Human Security yang dijelaskan PBB, isu pendidikan sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung berhubungan dengan kemanan manusia kecuali jika dihubungkan dengan dimensi Keamanan Ekonomi. Namun jika berkaca pada penjelasan Human Security dari pandangan ASIA, inklusifitas merupakan hal yang penting untuk memberikan rasa aman kepada manusia. Selain inklusifitas, persoalan pendidikan juga masih menjadi masalah struktural sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam mencapai Tujuan keempat sangat beririsan dengan Human Security.

e. Aksi Daerah untuk Tujuan 5

Tujuan kelima SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Masalah gender masih menjadi momok terutama untuk negara berkembang. Dalam aksinya pemerintah NTB berusaha untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan di NTB masih terbilang tinggi.⁷ Sehingga penghapusan kekerasan tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di NTB. Selain itu pemerintah NTB juga melakukan pendidikan seksual dan keluarga berencana untuk menurunkan jumlah pernikahan dini. Beberapa pakar menyebutkan praktik pernikahan dini sudah berbudaya di NTB. Beberapa aksi lain yang dilakukan oleh pemerintah NTB untuk mendukung tujuan kelima adalah penjaminan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, peningkatan penggunaan teknologi, dan kebijakan dan perundang – undangan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Sebagian aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah NTB cukup mewakili pemberian rasa aman terhadap manusia khususnya perempuan terutama dalam dimensi *Health Security, Personal Security, dan Community Security*. Namun beberapa aksi masih harus diselaraskan dengan Human Security. Peningkatan penggunaan teknologi masih belum memiliki korelasi dengan pemberian rasa aman kepada manusia khususnya perempuan. Selain itu aksi terakhir yang berhubungan dengan kebijakan masih sulit untuk dilaksanakan karena proses pembuatan kebijakan (terutama kebijakan tentang gender) di Indonesia belum benar – benar melalui proses *Bottom – Up* sehingga hal ini masih menjadi tantangan untuk pemerintah daerah.⁸

⁷ Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 'Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Di Provinsi NTB' <<https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kekerasan-terhadap-perempuan-dewasa-di-provinsi-ntb>>.

⁸ Triana Sofiani, 'MEMBUKA RUANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN', *Muwazah*, 1.1 (2019), 66–70.

f. Aksi Daerah untuk Tujuan 8

Dalam pemenuhan tujuan kedelapan, pemerintah NTB mengembangkan ekonomi mikro, pemberdayaan UMK, dan meningkatkan industry pariwisata. Aksi-aksi tersebut sudah sangat disesuaikan dengan kondisi daerah. Isu ekonomi memang sudah melekat dengan pendekatan Human Security sehingga apa yang dilakukan pemerintah NTB sangat berhubungan dengan mengamankan kondisi ekonomi masyarakat. Aksi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Materi Bappeda Provinsi Ntb

Materi kedua disampaikan oleh bapak Syamsul Hidayat, SP.t. yang juga menjabat sebagai Kasubid Investasi dan Keuangan BAPPEDA NTB sebagai perwakilan dari pemerintah dalam kegiatan ini. Pada pamarannya disampaikan pelaksanaan RAD sejauh ini beserta pihak – pihak yang terlibat untuk setiap tujuan dalam SDGs. Disampaikan pula sampai saat ini pemerintah NTB belum berhasil secara penuh dalam mencapai SDGs yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam RAD. Selain itu amaslah yang paling utama adalah kesulitan dalam mendapatkan data riil dari pelaksanaan tersebut. Kemudian ditambahkan juga bahwa semua pihak diharapkan bisa ikut serta dalam kegiatan terutama dalam program UMKM. Banyak program UMKM yang dipimpin oleh pemuda, tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk sekitarnya. Menjadi panutan. Dan dalam pelaksanaannya distimulus oleh pemerintah. Stakeholders atau pemangku kepentingan: sektor publik, sektor swasta, masyarakat sipil. Pelaksanaan diskusi publik ini juga sangat diapresiasi dan menjadi contoh baik dalam menemukan strategi untuk mencapai SDGs bagi BAPPEDA. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi awal terciptanya kolaborasi antara Pemerintah provinsi, prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram, dan komunitas pemuda di kota Mataram.

3. Pembahasan Diskusi Bersama Komunitas

3.1 Earth Hour Mataram

EH Mataram saat ini sedang melakukan kegiatan PFON atau Plastic Free Ocean Network. Earth Hour merupakan gerakan internasional untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan. PFON bertugas mendata sampah yang ada, kecuali sampah organik, dan mencoba melihat *brand* dari sampah – sampah tersebut. Tujuan utama untuk pencegahan agar sampah-sampah ini tidak ada lagi di laut. Earth Hour juga menyampaikan bahwa mereka memiliki harapan besar agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, lebih peduli pada lingkungan dan pesisir pantai.

3.2 Duta Damai NTB

Duta damai merupakan komunitas yang bergerak dalam mempromosikan perdamaian di dunia maya. Mereka memiliki fokus dalam pembuatan konten perdamaian dan tidak bergerak di lapangan. Selain mempromosikan perdamaian mereka juga mengkampanyekan anti radikalisme bersama BNPT.

3.3 Buku Ini Aku Pinjam

Komunitas Buku Ini Aku Pinjam sudah ada sejak 2016 dan memiliki fokus pada isu pendidikan. Komunitas ini juga mengatakan bahwa pendidikan tidak lepas dari kegiatan literasi sehingga mereka sangat mendorong minat baca anak – anak. Komunitas ini juga mengatakan bahwa minat baca di NTB masih rendah. Selain itu mereka juga bercerita dimana mereka pernah mengadakan kegiatan lapak baca buku di taman Sangkareang. Tetapi kegiatan ini kemudian ditertibkan oleh SATPOL PP karena mereka dianggap sedang berjualan. . selain itu mereka memberikan edukasi membaca di daerah – daerah terpencil.

3.4 Dewan Anak Mataram

Dewan Anak Mataram adalah komunitas yang memiliki perhatian terhadap anak-anak. Saat ini mereka memiliki kegiatan pengolahan sampah kertas dan zero waste. Samapha – sampah yang diolah kemudian dijadikan barang-barang yang masih dapat digunakan. Komunitas ini nuga berharap untuk bisa lebih berkontribusi terutama anak-anak dengan berkolaborasi bersama pemerintah.

3.5 Lasingan.id

Lasingan.id adalah sebuah media alternatif yang dibentuk oleh salah satu pemuda di kota Mataram. Lasingan.id yang memberikan informasi terkait kesenian, media, atau aktivitas komunitas. Merka juga memiliki gerakan untuk mengekspose eksistensi kegiatan komunitas di Kota Mataram. Gerakan ini berangkat dari perhatian mereka yang melihat masih banyak komunitas yang berperan aktif dalam kehidupan sosial namun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka juga langsung mengisiasi kolaborasi bersama komunitas yang hadir di kegiaitan ini.

3.6 Jelajah Jangkuk

Jelajah jangkuk merupakan komunitas terkahir yang memberikan pendapat pada kegiatan ini. Jelajah Jangkuk merupakan gerakan enviromentalis dan memiliki program *invest island foundation*. Komunitas ini juga mengatakan bahwa mereka telah menjadikan SDGs sebagai pedoman kegiatan mereka terutama tujuan SDGs nomor 6 dan 14. Mereka juga beruhana unutm melaksanakan kegiatan yang holistik dan komprehensif serta melaksanakan kerjasama bersama pemerintah dan akademisi. Jelajah Jangkuk berharap agar semua orang daoat terlibat dalam menjaga kebersihan terutama kebersihan sungai Jangkuk.

4. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Kemanan Manusia dalam Rencana Aksi Daerah (RAD)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global untuk mencapai tujuan berkelanjutan di seluruh dunia dengan memiliki prinsip inklusifitas. Tidak hanya negara, semua pihak dilibatkan dalam menyukkseskan agenda ini. Setiap negara kemudian mencoba mengadopsi agenda SDGs yang kemudian diimplementasikan dengan menyelaraskan dengan kondisi di negaranya masing – masing termasuk Indonesia. Indonesia

mencoba memanfaatkan agenda SGDs untuk dijadikan pedoman pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk BAPPENAS sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah daerah juga turut dilibatkan melalui peraturan presiden tahun 2016. Pemerintah NTB kemudian menyambut instruksi presiden tersebut dengan menghadirkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. RAD tersebut kemudian menjadi pedoman dan strategi. Penelitian telah mencoba untuk merefleksi setiap aksi yang dilakukan pemerintah NTB untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep Human Security (Keamanan Manusia).

Aksi yang pertama masih belum dijelaskan secara khusus sehingga masih belum dapat direfleksikan dengan konsep Human Security. Untuk aksi kedua, dapat dikatakan sejalan dengan dengan Human Security terutama dalam segi ekonomi, makanan, dan kesehatan. Sedangkan untuk aksi ketiga, aksi yang dilakukan pemerintah NTB sejalan dengan prinsip Human security yaitu *people-centered* sekaligus memberikann rasa aman untuk sektor kesehatan. selanjutnya aksi keempat dimana aksi yang dilakukan pemerintah NTB merefleksikan bagian – bagian penting dalam Human Security seperti kemandirian ekonomi dan juga menampilkan prinsip inklusifitas sekaligus menargetkan untuk menyelesaikan masalah structural. Di sisi lain untuk mencapai tujuan kelima aksi yang dilakukan pemerintah NTB memenuhi syarat keamanan kesehatan, kemandirian komunitas, dan keamanan personal. Namun sayangnya aksi tersebut belum melalui proses “*bottom-up*”. Berikutnya dalam aksi untuk mencapai tujuan keenam pemerintah NTB melibatkan masyarakat secara langsung dimana hal ini sangat disarankan dalam prinsip dan konsep Human Security. Sayangnya untuk aksi berikutnya masih belum dapat direfleksikan. Aksi kedelapan masih dapat direfleksikan terutama terkait kemandirian ekonomi. Sedangkan untuk aksi kesembilan tidak secara eksplisit dapat direfleksikan dengan Human Security tetapi aksi tersebut dapat menjamin kebutuhan hidup masyarakat. Aksi selanjutnya dapat dikatakan sangat sejalan terutama untuk kemandirian kesehatan, ekonomi dan komunitas. Sayangnya aksi ke 11 untuk mencapai tujuan SDGs masih belum dijelaskan secara konkrit. Sedangkan untuk mencapai tujuan ke 13 aksi yang dilakukan mencerminkan prinsip multisetoral dan berorientasi pada pencegahan. Aksi berikutnya dapat dikatakan sangat baik karena ditujukan pada isu yang sangat spesifik. Selanjutnya aksi daerah untuk tujuan 15 cukup digambarkan mewakili keamanan komunitas. Sedangkan untuk aksi berikutnya dapat dikatakan mencerminkan pemberian rasa aman kepada individu dan juga memenuhi kebutuhan dasar. Untuk aksi yang terakhir masih terbelang isu yang baru dan belum dijelaskan secara komprehensif pula oleh konsep Human Security.

KESIMPULAN DAN SARAN

Provinsi NTB harus serius dalam menerapkan SDGs agar berada pada jalan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi harus dilaksanakan mulai dari tahap perancangan kebijakan sampai pelaksanaan RAD. Perancangan kebijakan dapat

menggunakan metode *bottom-up* dan *top-down* dengan melibatkan lapisan masyarakat. Dengan melibatkan komunitas pemuda, pelaksanaan RAD akan menjadi lebih kuat dimana pelaksanaan ini bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini dimana tim penulis ingin menguatkan nilai – nilai dan pelaksanaan RAD bersama komunitas kepemudaan di kota Mataram. Penguatan dilaksanakan dengan mengadakan diskusi publik dengan mengundang komunitas dan juga Bappeda provinsi NTB. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut dengan meningkat sinergi, kolaborasi, dan intergrasi antara pemerintah, masyarakat (yang diwakili oleh komunitas), dan akademisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, tim pengabdian ingin mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional yang senantiasa selalu mendukung dan membimbing tim dari awal sampai akhir, termasuk membantu untuk urusan administrasi. Berikutnya ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang membantu dalam proses pencarian dana untuk kegiatan. Selanjutnya tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bappeda yang turut memberikan beberapa data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas kepemudaan yang hadir dan terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perpres No 59 Tahun 2017.

Laporan Rapat Umum PBB, *In larger freedom: towards development, security and human rights for all*, PBB, 2005

Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Cabtree, Andrew dan Gasper, Des, *The Sustainable Development Goals and Capability and Human Security Analysis*, dalam *Sustainability, Capabilities and Human Security*, 2020, Swiss: Palgrave Macmillan.

Alisjahbana, Armida Salsiah et. all., *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah - daerah di Indonesia*, Unpad Press: Bandung, 2018

Syaiful Anam, Et. All, 2020. Workshop dan FGD 'Peran dan Kontribusi Organisasi Filantropi Internasional Dalam Mendukung Capaian Pembangunan Berkelanjutan di provinsi NTB. Prosiding Semnaskom 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Mataram: 22 Oktober 2020

Analisis Parameter Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adia Islami Permono, Program Studi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Panuluh, Sekar dan Fitri, Meila Riskia, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia: September 2015-September 2016*, Briefing Paper 02, diterbitkan di HYPERLINK "<https://www.sdg2030indonesia.org/>" <https://www.sdg2030indonesia.org/>, 1 Oktober 2016

Suara NTB, *Implementasikan SDG's, Kemiskinan dan Masalah Lingkungan Tantangan Terberat NTB*, HYPERLINK "<https://www.suarantb.com/implementasikan-sdgs-kemiskinan-dan-masalah-lingkungan-tantangan-terberat-ntb/>"

<https://www.suarantb.com/implementasikan-sdgs-kemiskinan-dan-masalah-lingkungan-tantangan-terberat-ntb/>, 4 ferbuari 2021

Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Berita Resmi Statistik,

https://mataramkota.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=A&Istilah_page=4, Januari 2021

Kompas, Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator,

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-indikator?page=all>, Januari 2021

Bappenas, *Tentang SDGs*, HYPERLINK "<http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>"
<http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>, 4 Februari 2021